



Jurnal Politeknik Caltex Riau

<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>

| e- ISSN : 2476-9460 (Online) | p- ISSN : 2085-0751 (Print)

Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Dimoderasi Pengawasan Internal

Aurora Febria¹, Taufeni Taufik² dan Devi Safitri³¹Universitas Riau, Program Studi Akuntansi, email: aurorafebria@gmail.com²Universitas Riau, Program Studi Akuntansi, email: taufentaufik94962@gmail.com³Universitas Riau, Program Studi Akuntansi, email: devisafitri@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial dengan pengawasan internal sebagai pemoderasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD di Kota Pekanbaru. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada 99 responden, dan hanya 93 kuesioner yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan menggunakan SPSS versi 17.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial dengan nilai signifikan $(0,027) < (0,05)$ dan $t_{hitung} (2,245) > t_{tabel} (1,987)$. Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial dengan nilai signifikan $(0,019) < (0,05)$ dan $t_{hitung} (2,382) > t_{tabel} (1,987)$. Pengawasan internal dapat memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dengan nilai signifikan $(0,04) < (0,05)$ dan $t_{hitung} (2,054) > t_{tabel} (1,987)$. Pengawasan internal dapat memoderasi hubungan antara akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial dengan nilai signifikan $(0,007) < (0,05)$ dan $t_{hitung} (2,783) > t_{tabel} (1,987)$.

Kata Kunci: Kinerja Manajerial, Partisipasi Anggaran, Akuntabilitas Publik, Pengawasan Internal

Abstract

The research is conducted to examine the effect of budgeting participation and public accountability on managerial performance with internal monitoring as moderating in Pekanbaru City Organization. The population in this research were all OPD in Pekanbaru City. Samples was determined by using purposive sampling method. Data collection was carried out by distributing questionnaires to 99 respondents, and only 93 questionnaires can be used in this study. Data analysis methods used are Multiple Linear Regression and Moderated Regression Analysis (MRA) using SPSS version 17.0. The results showed that budgetary participation affected managerial performance with significant values $(0.027) < (0.05)$ and $t_{count} (2.245) > t_{table} (1.987)$. Public accountability affected managerial performance with significant values $(0.019) < (0.05)$ and $t_{count} (2.382) > t_{table} (1.987)$. Internal monitoring can moderate the relationship between budgetary participation on managerial performance with a significant value of $(0,04) < (0,05)$ and $t_{count} (2,054) > t_{table} (1,987)$. Internal monitoring can moderate the relationship between

public accountability on managerial performance with a significant value of $(0.007) < (0.05)$ and $t_{count} (2,783) > t_{table} (1.987)$.

Keywords: *Managerial Performance, Budgeting Participation, Public Accountability, Internal Monitoring.*

1. Pendahuluan

Ada beberapa faktor yang diduga penyebab kinerja pemerintah daerah rendah diantaranya yaitu sistem pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah dimulai dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD, pelaksanaan/penatausahaan APBD, pertanggungjawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan APBD dan pengawasan [1].

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Pekanbaru 2018 No.23.A/LHP/XVIII.PEK/05/2019 [2] terdapat temuan, yaitu pada perencanaan terdapat adanya kesalahan penganggaran belanja modal pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.700.959.604,00. Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak optimal dalam mengusulkan RKA untuk pembahasan APBD TA 2018; dan
- b. TAPD kurang optimal dalam mengevaluasi usulan RKA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah. Tetapi realitanya, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru tidak mencapai target pada tahun 2018 dimana hanya dapat merealisasikan PAD dengan persentase 54,60% dengan anggaran sebesar Rp1.085.555.818.588,00 dan realisasi sebesar Rp592.707.161.811,78 [2].

Selain itu, terdapat juga permasalahan dalam hal pertanggungjawaban dimana nilai SAKIP Kota Pekanbaru pada tahun 2017 lalu, hanya ada peningkatan sebesar 1,18 persen. Pada tahun 2017, Kota Pekanbaru hanya mampu meraih prediket C dengan nilai SAKIP 53,50. Sedangkan pada tahun 2018 ini, Pekanbaru hanya mampu meraih prediket CC dengan nilai 54,68 saja. Nilai dari Kota Pekanbaru ini tidak mencerminkan nilai sebagai ibukota dari Provinsi Riau. Walikota Pekanbaru, Firdaus MT menyebutkan prediket CC cerminan ketidaksiplinan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Pekanbaru dan Walikota telah memberi peringatan kepada seluruh OPD untuk meningkatkan kinerjanya. Mereka harus dapat menggenjot penilaian SAKIP menjadi predikat BB [3].

Dalam kinerja manajerial, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya suatu kinerja. Faktor-faktor tersebut adalah partisipasi anggaran dan akuntabilitas publik. Tidak konsistennya peneliti-peneliti terdahulu menarik peneliti untuk meneliti lebih lanjut dengan menambahkan variabel moderasi pengawasan internal.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Kanji [4] yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD di Kota Makassar. Dari pengungkapan alasan-alasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan menggunakan variabel independen Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Anggaran dari Jannah [5] serta variabel moderasi Pengawasan Internal dari Ernawilis [6].

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) dikembangkan di tahun 1970-an terutama pada tulisan Jensen dan Meckling [7] pada tulisan yang berjudul "*Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure*". Teori agensi mengungkapkan adanya hubungan kepentingan antara *principal* dengan *agent*. Teori agensi (*Agency Theory*) menjelaskan suatu

fenomena yang terjadi apabila atasan mendelegasikan wewenangnya kepada bawahannya untuk melakukan suatu tugas atau otoritas untuk membuat keputusan [8].

2.1.2 Kinerja Manajerial

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur [9]. Menurut Mahoney *et. al* [10] kinerja manajerial merupakan kinerja individu anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan manajerial seperti dari proses perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, supervisi, pengaturan staf (staffing), negosiasi dan representasi.

2.1.3 Partisipasi Anggaran

Menurut Hansen dan Mowen [11], partisipasi anggaran (*budgeting participation*) adalah pendekatan penganggaran yang memungkinkan para manajer yang akan bertanggungjawab atas kinerja anggaran, untuk berpartisipasi dalam pengembangan anggaran, partisipasi anggaran mengkomunikasikan rasa tanggung jawab pada para manajer tingkat bawah dan mendorong kreatifitas.

2.1.4 Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung-jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut [12].

2.1.5 Pengawasan Internal

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik [13].

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah

Anthony dan Govindarajan [8] menyatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan pendekatan manajerial yang umumnya dinilai mempunyai pengaruh positif terhadap perilaku dan kinerja manajerial. Terciptanya kinerja yang baik dapat terwujud jika manajer dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Salah satu alat atasan untuk menilai kinerja adalah tingkat keaktifan partisipasi anggaran dari manajer atau karyawan [14].

Penelitian oleh Heskil [15], Sari [16] dan Kamilah [17] menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

H_1 : Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial OPD Kota Pekanbaru

2.2.2 Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah

Mardiasmo [12] mengatakan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat.

Penelitian oleh Setiyawan [18] dan Sari [16] menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial OPD. Hasil penelitian Agustiniingsih [19] menyatakan bahwa dengan penerapan *good governance* daerah yang baik maka pemerintah daerah akan dapat mengelola kerjanya dengan lebih baik terutama dibidang pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian Taufik [20] menyimpulkan bahwa ada pengaruh *good governance* terhadap pencegahan penipuan, dimana pencegahan penipuan itu merupakan tujuan dari salah satu indikator dalam kinerja manajerial yaitu pengawasan.

H_2 : Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial OPD Kota Pekanbaru

2.2.3 Pengaruh Pengawasan Internal Memoderasi Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pengawasan diperlukan pada setiap tahapan bukan hanya pada tahap evaluasi saja [12]. Dengan adanya pengawasan, maka diharapkan proses pengelolaan keuangan daerah terutama dalam proses penyusunan anggaran dan adanya partisipasi semua pihak dalam penyusunan anggaran akan memperbesar pengaruhnya terhadap kinerja manajerial OPD [21].

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ernawilis [6] dan Mukaromah [21] menyatakan bahwa pengawasan internal dapat memoderasi partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial OPD.

H_3 : Pengawasan internal memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial OPD Kota Pekanbaru

2.2.4 Pengaruh Pengawasan Internal Memoderasi Hubungan Antara Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah

Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pertanggungjawaban pada pertanggungjawaban horizontal, bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Sehingga perlu dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik [22]. Jika kurangnya pengawasan maka pelaksanaan APBD tidak terealisasi dengan benar dan pertanggungjawaban bisa dituntut oleh masyarakat. Masyarakat dapat berperan dalam pengawasan atas kinerja pemerintah daerah, sehingga jalannya pemerintah dapat berlangsung dengan baik.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ernawilis [6] dan Mukaromah [21] menyatakan bahwa pengawasan internal dapat memoderasi akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial OPD. Hasil penelitian Taufik [23] menyatakan pengawasan internal memiliki pengaruh signifikan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dimana pemerintahan yang baik itu merupakan perwujudan dari kinerja manajerial di daerah tersebut dan menurut penelitian Yulisa [24] bahwa pengawasan internal pemerintah dapat mempengaruhi akuntabilitas daerah. Akuntabilitas merupakan tujuan dari salah satu indikator dalam kinerja manajerial yaitu evaluasi, dimana jika akuntabilitas di daerah tersebut baik, maka hal itu akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah tersebut.

H_4 : Pengawasan internal memoderasi hubungan antara akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial OPD Kota Pekanbaru

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Pekanbaru. Sampel pada penelitian ini adalah pejabat pada dinas pemerintah daerah setingkat Kepala, Kepala Bidang/Bagian dan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen sebanyak 3 orang pada masing-masing kantor dinas di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada masing-masing OPD.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil *Descriptive Statistics*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Partisipasi Anggaran	93	11	20	15.29	2.062
Akuntabilitas Publik	93	35	55	45.34	3.804
Kinerja Manajerial	93	39	65	49.71	6.967
Pengawasan Internal	93	11	20	15.25	1.516
Valid N (listwise)	93				

Sumber: Data Olahan 2020

4.2 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen [25]. Berdasarkan proses pengolahan data yang dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2.
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.384 ^a	.148	.129	6.503

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Publik, Partisipasi Anggaran

b. Dependent Variable: Kinerja Manajerial

Sumber: Data Olahan (2020)

Dari tabel di atas diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,148. Artinya bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 14,8%, sedangkan sisanya 85,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

4.3 Hasil Uji Hipotesis

Berikut ini dapat diuraikan mengenai hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini:

4.3.1 Partisipasi Anggaran (X_1)

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis Pertama

Variabel Independen	t Hitung	t Tabel	Sig.	Keterangan
Partisipasi Anggaran (X_1)	2.245	1,987	0,027	Berpengaruh

Sumber: Data Olahan (2020)

Dari hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa t hitung $>$ t tabel yaitu $2,245 > 1,987$ dan signifikansi $0,027 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

4.3.2 Akuntabilitas Publik (X_2)

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis Kedua

Variabel Independen	t Hitung	t Tabel	Sig.	Keterangan
Akuntabilitas Publik (X_2)	2.382	1,987	0,019	Berpengaruh

Sumber: Data Olahan (2020)

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa t hitung $>$ t tabel yaitu $2.382 > 1,987$ dan signifikansi $0,019 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Publik berpengaruh dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

4.4 Hasil Moderated Regression Analysis (MRA)

4.4.1 Hasil Moderated Regression Analysis (MRA) Hipotesis Ketiga

Tabel 5. Hasil Moderated Regression Analysis Hipotesis Ketiga
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	129.596	51.111		2.536	.013
	Partisipasi Anggaran	-6.075	3.367	-1.798	-1.804	.075
	Pengawasan Internal	-6.056	3.362	-1.318	-1.802	.075
	Partisipasi Anggaran*Pengawasan Internal	.449	.219	2.983	2.054	.043

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial

Sumber: Data Olahan (2020)

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa t hitung $>$ t tabel yaitu $2,054 > 1,987$ dan signifikansi $0,043 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Internal dapat memoderasi Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo [12] dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pelaksanaan APBD dan Pertanggung jawaban APBD yang meliputi setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, maka diharapkan proses pengelolaan keuangan daerah terutama dalam proses penyusunan anggaran akan memperbesar pengaruhnya terhadap kinerja manajerial OPD.

4.4.2 Hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA) Hipotesis Keempat

**Tabel 6. Hasil *Moderated Regression Analysis* Hipotesis Keempat
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	198.156	66.728		2.970	.004
	Akuntabilitas Publik	-3.511	1.446	-1.917	-2.428	.017
	Pengawasan Internal	-11.460	4.463	-2.493	-2.568	.012
	Akuntabilitas Publik*Pengawasan Internal	.268	.096	3.903	2.783	.007

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial

Sumber: Data Olahan (2020)

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa t hitung $>$ t tabel yaitu $2,783 > 1,987$ dan signifikansi $0,07 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Internal dapat memoderasi Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pertanggungjawaban pada pertanggungjawaban horizontal, bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Sehingga perlu dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik [22]. Jika kurangnya pengawasan maka pelaksanaan APBD tidak terealisasi dengan benar dan pertanggungjawaban bisa dituntut oleh masyarakat. Masyarakat dapat berperan dalam pengawasan atas kinerja.

Adanya pengawasan internal, kinerja aparatur pemerintah daerah akan lebih disiplin dan pencapaian target akan tercapai, karena aparatur selalu di monitoring. Sehingga laporan akuntabilitas publik akan lebih terpenuhinya prinsip pertanggungjawaban dan dapat menimbulkan implikasi yang luas bagi masyarakat, serta pemerintah daerah yang *accountable*. Dengan pengawasan internal, maka pelaksanaan APBD dapat terealisasi dengan benar dan pertanggungjawaban bisa dituntut oleh masyarakat.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial, akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial, pengawasan internal dapat memoderasi

hubungan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial, dan pengawasan internal dapat memoderasi hubungan antara akuntabilitas publik dengan kinerja manajerial

Daftar Pustaka

- [1] Primadana, G. H. M, Gede A. Y, I Made P. A. 2014. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Badung). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ghanesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 2 No. 1. 1-11.
- [2] BPK Perwakilan Provinsi Riau. 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kota Pekanbaru Tahun 2018*.
- [3] Wibowo, Guruh Budi. 2019. Wako Kesal Nilai SAKIP Kota Pekanbaru Hanya Naik 1,18 Persen. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/02/04/wako-kesal-nilai-sakip-kota-pekanbaru-hanya-naik-118-persen>.
- [4] Kanji, Lusiana. 2018. *Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Di Kota Makassar*. Bongaya Journal For Research in Accounting, Vol. 1 No. 1.
- [5] Jannah, Miftahul dan Sri Rahayu. 2015. Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Tujuan Anggaran, Keadilan Distributif dan Pengawasan Internal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 3 No. 2.
- [6] Ernawilis. 2015. Pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah SKPD dengan pengawasan internal sebagai variabel pemoderasi Kabupaten Kuantang Singing. *JOM fekon*, Vol. 2 No. 2. 1-14.
- [7] Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure". *Journal of Finance Economic*.
- [8] Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan. 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat. Jakarta.
- [9] Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- [10] Mahoney, T. A, Jerdee and S.J Carroll. 1963. *Development of Managerial Performance. A research Approach*. Cincinnati. Ohio: South Western Publising. Co
- [11] Hansen dan Mowen. 2013. *Akuntansi Manajerial*. Salemba Empat. Jakarta
- [12] Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [13] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
- [14] Medhayanti Putu Ni dan Suardana. 2015. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Self Efficacy, Desentralisasi, Dan Budaya Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*. Bali: Universitas Udayana.

- [15] Heskil, Petriana., Danik Tri Purwanti, dan Anni Fidayati. 2017. Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Magelang). *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, Vol. 15 No. 2.
- [16] Sari, Desak Putu Intan Permata., Ni Kadek Sinarwati, dan Edy Sujana. 2014. Pengaruh Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (studi empiris SKPD Kabupaten Buleleng). *E-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 2 No 1.
- [17] Kamilah, Faizah, Taufeni Taufik, dan Edfan Darlis. 2017. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Rumah Sakit di Pekanbaru). *Jurnal SOROT*, Vol. 8 No. 2. 1-190.
- [18] Setiyawan, Hari Eka dan Muhammad Safri. 2016. Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 4 No. 1.
- [19] Agustiningasih, Maulina, Taufeni Taufik, dan Novita Indrawati. 2020. Pengaruh Good Governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar, dan Kecamatan Bangkinang Kota). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 4 No. 1.
- [20] Taufik, Taufeni. 2019. The Effect of Internal Control System Implementation in Realizing Good Governance and Its Impact on Fraud Prevention. *International Journal of Scientific & Technology Research*. Vol. 8 Issue 09.
- [21] Mukaromah, U., & Wahyu, P. 2018. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Desentralisasi, Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Karanganyar). *Doctoral Dissertation*, Iain Surakarta.
- [22] Mahsun, M., Sulistiyowati, F., & Purwanugraha, H. A. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga Cetakan Kelima. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- [23] Taufik, Taufeni, Yusraini, dan Y. Anisma. 2017. *Analysis of factors influence in realization of good governance (Study on SKP (Tax Assessments) Pekanbaru City)*. *International Journal of Applied Business and Economic Research*. Vol. 15 No. 15. 279-290
- [24] Yulisa, Febri, Vince Ratnawati, dan Taufeni Taufik. 2020. *The Factors Affecting Regional Financial Accountability: Organizational Commitment as Moderating Variables (Study on Rokan Hilir District Government OPD)*. *International Journal of Economics, Business, and Applications*. Vol. 4 No. 2. 61-73.
- [25] Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.